

ANALISIS FAKTOR KEPATUHAN PELAPORAN KEUANGAN ISAK 35 PADA GKJW JEMAAT BANJAREJO

Sherly Elvica Natalia^{1*}, Sigit Puji Winarko², Erna Puspita³

^{1,2,3} Universitas Nusantara PGRI Kediri, Kediri, Indonesia

*e-mail: sherlynatalia828@gmail.com

Histori Artikel	ABSTRACT
Diterima: 23 Juni 2026 Revisi: 24 Juni 2026 Disetujui: 25 Juni 2026 Diterbitkan: 1 September 2026 Keywords: ISAK 35; Financial Reporting Compliance; Nonprofit Entity; Financial Statements;	Purpose: This study aims to analyze and describe the influence of the church treasurer understanding of ISAK 35 on financial reporting compliance at GKJW Banjarejo congregation, examine the support of pastors and church assembly in implementing financial reporting based on ISAK 35, and identify the challenges faced by the church treasurer in its implementation. Method: This qualitative study uses data reduction, data presentation, and conclusion drawing as analysis techniques. The subjects were selected purposively, involving the church treasurer, pastor, and church assembly of GKJW Banjarejo Congregation. Data were collected through interviews, observation, and documentation. Finding: This results of the study indicate that trasurer understanding of ISAK 35 is still limited so that the financial reports prepared do not comply with the accounting standards of nonprofit entities. Support from the pastor and congregation assembly has been provided through supervision, consultation, and administrative assistance, but has not specifically supported the implementation of ISAK 35 due to limited understanding. The findings of this study indicate a lack of knowledge among treasurer regarding ISAK 35. Therefore, it is necessary to improve the competence and understanding of all parties so that church financial reporting can be more in accordance with standards. Novelty: The novelty of this research lies in examining the factors influencing compliance with ISAK 35 financial reporting in church based nonprofit entity, specifically the GKJW Banjarejo Congregation. This research provides a broader perspective by analyzing not only the understanding of the congregation's treasurer, but also the role of support from the pastor and congregation assembly, as well as the obstacles encountered in the process of implementing the standard. This research contributes to understanding the importance of capacity building and collaboration in realizing transparent and standard compliant church financial reporting.

Hak Cipta (c) 2026 Jurnal Literasi Akuntansi



Artikel ini berlisensi Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Pelaporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban organisasi dalam mengelola sumber daya yang telah dipercayakan oleh pihak internal maupun eksternal. Bagi organisasi nirlaba seperti gereja, laporan keuangan tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga menjadi sarana untuk menunjukkan transparansi, akuntabilitas, dan penerapan tata kelola organisasi yang baik (good governance). Berdasarkan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35, entitas nonlaba perlu menyajikan laporan keuangan yang mampu

menggambarkan kondisi keuangan, aktivitas operasional, serta arus kas secara relevan dan andal. Penyajian laporan keuangan sesuai standar tersebut diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan, seperti jemaat, donatur, dan pihak pengawas terhadap pengelolaan keuangan organisasi.

Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW) Jemaat Banjarejo merupakan salah satu organisasi nirlaba yang menjalankan kegiatan pelayanan, pembinaan iman, serta aktivitas sosial kemasyarakatan. Dalam menjalankan pelayanannya, gereja mengelola sumber dana yang berasal dari persembahan jemaat, sumbangan sukarela, dan berbagai kegiatan pelayanan. Pengelolaan dana tersebut menuntut adanya pelaporan keuangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun, praktik penyusunan laporan keuangan pada GKJW Jemaat Banjarejo masih dilakukan secara sederhana dan belum sepenuhnya mengacu pada ketentuan ISAK 35. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara standar akuntansi yang berlaku dengan praktik pelaporan keuangan pada tingkat jemaat, sehingga diperlukan kajian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan penerapan standar tersebut.

Penelitian terdahulu mengenai penerapan ISAK 35 pada entitas nonlaba, khususnya gereja, pada umumnya masih berfokus pada analisis kesesuaian bentuk dan komponen laporan keuangan dengan standar yang berlaku. Warastuti et al., (2022) menyoroti kondisi bahwa gereja belum sepenuhnya menerapkan seluruh komponen laporan keuangan berdasarkan ISAK 35, terutama laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Sementara Purba & Ndruru, (2023) serta Girsang & Purba, (2024) membahas keterkaitan teknis dalam penyusunan laporan keuangan, seperti pencatatan yang masih sederhana dan kesulitan dalam pengelompokan aset neto. Meskipun penelitian tersebut memberikan gambaran mengenai tingkat penerapan ISAK 35, masih terdapat keterbatasan dalam menjelaskan faktor penyebab organisasi gereja belum mampu memenuhi standar pelaporan keuangan secara konsisten.

Kebaruan penelitian ini terletak pada belum adanya kajian yang secara khusus menganalisis faktor yang memengaruhi kepatuhan pelaporan keuangan sesuai ISAK 35 pada gereja. Sebagian besar penelitian sebelumnya menempatkan ketidaksesuaian laporan keuangan sebagai permasalahan utama, tetapi belum menggali lebih dalam mengenai aspek sumber daya manusia, dukungan organisasi, serta hambatan internal yang menyebabkan rendahnya kepatuhan tersebut. Penerapan standar akuntansi pada entitas nonlaba tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan aturan, tetapi juga oleh pemahaman pihak yang bertanggung jawab dalam penyusunan laporan keuangan, dukungan dari struktur organisasi, dan kemampuan organisasi dalam menyediakan sistem pengelolaan keuangan yang memadai.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih menekankan pada evaluasi hasil akhir berupa kesesuaian laporan keuangan, penelitian ini berupaya mengidentifikasi faktor yang memengaruhi proses tercapainya kepatuhan pelaporan keuangan sesuai ISAK 35 pada GKJW Jemaat Banjarejo. Penelitian ini mengkaji bagaimana pemahaman bendahara jemaat terhadap ISAK 35, bagaimana peran pendeta dan majelis jemaat dalam mendukung penerapan prinsip akuntabilitas, serta bagaimana kendala teknis maupun nonteknis memengaruhi proses penyusunan laporan keuangan. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini memberikan perspektif yang lebih mendalam mengenai kondisi nyata penerapan ISAK 35 pada organisasi gereja yang memiliki karakteristik pelayanan dan keterbatasan sumber daya tertentu.

Dengan demikian, kebaruan penelitian ini tidak hanya terletak pada objek penelitian yaitu GKJW Jemaat Banjarejo, tetapi juga pada fokus analisis terhadap faktor penyebab kepatuhan pelaporan keuangan. Penelitian ini berusaha menjembatani kesenjangan antara standar akuntansi yang telah diterapkan dengan praktik pengelolaan keuangan di tingkat jemaat. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang memengaruhi kepatuhan pelaporan keuangan sesuai ISAK 35 pada GKJW Jemaat Banjarejo. Penelitian ini diharapkan dapat

menjadi bahan evaluasi bagi pengurus jemaat dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi organisasi nirlaba lainnya dalam menerapkan standar pelaporan keuangan yang sesuai dengan karakteristik organisasinya.

LANDASAN TEORI

ISAK 35

ISAK 35 merupakan interpretasi standar akuntansi keuangan yang mengatur penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba. ISAK 35 diterbitkan oleh IAI mengatur tentang penyajian laporan keuangan entitas nonlaba (Palupi et al., 2023). Standar ini menggantikan PSAK 45 dengan memberikan pendekatan penyajian laporan keuangan yang lebih menekankan pada transparansi informasi keuangan, akuntabilitas penggunaan sumber daya, serta kemampuan entitas dalam mempertanggungjawabkan aktivitasnya kepada para pemangku kepentingan.

Penerapan ISAK 35 pada organisasi nonlaba tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis penyusunan laporan keuangan, tetapi juga mencerminkan tingkat tata kelola organisasi dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan oleh masyarakat. Entitas nonlaba seperti gereja memperoleh sebagian besar sumber daya dari pemberian sukarela jemaat atau pihak lain yang tidak mengharapkan pengembalian manfaat ekonomi secara langsung. Oleh karena itu, penyajian laporan keuangan berdasarkan ISAK 35 menjadi bentuk pertanggungjawaban moral dan organisasi dalam menunjukkan bahwa dana yang diterima telah digunakan sesuai dengan tujuan pelayanan.

Berdasarkan ISAK 35, laporan keuangan entitas nonlaba terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan (IAI, 2018). Kelima komponen tersebut memiliki fungsi yang berbeda dalam memberikan informasi mengenai kondisi aset dan kewajiban, perubahan sumber daya, aktivitas operasional, serta arus penggunaannya organisasi. Kelengkapan penyajian laporan keuangan tersebut menjadi salah satu indikator bahwa organisasi telah memahami dan mematuhi standar pelaporan keuangan yang berlaku (Alvionita et al., 2025).

Suatu entitas dapat menerapkan ISAK 35 apabila memiliki karakteristik sebagai entitas nonlaba. Karakteristik tersebut dapat dilihat dari sumber daya yang diperoleh dari pemberi dana yang tidak mengharapkan imbalan ekonomi secara langsung, kegiatan yang dilakukan bertujuan memberikan pelayanan, serta tidak adanya pembagian keuntungan kepada pendiri atau pihak tertentu. Berdasarkan karakteristik tersebut, gereja termasuk dalam kategori entitas nonlaba karena aktivitas utamanya berorientasi pada pelayanan keagamaan dan sosial, bukan pada pencapaian keuntungan.

Kepatuhan Pelaporan Keuangan

Kepatuhan pelaporan merupakan kemampuan organisasi dalam menjalankan proses pencatatan, penyusunan, penyajian, dan pengungkapan informasi keuangan sesuai dengan standar yang telah diterapkan. Dalam konteks penerapan ISAK 35 pada organisasi gereja, kepatuhan tidak hanya diukur dari ada atau tidaknya laporan keuangan, tetapi juga sejauh mana laporan tersebut memenuhi prinsip andal, kelengkapan informasi, serta kesesuaian dengan komponen laporan keuangan yang dipersyaratkan. Semakin tinggi tingkat pemahaman dan dukungan organisasi, maka semakin besar kemungkinan organisasi mampu memenuhi standar pelaporan keuangan yang berlaku.

Kepatuhan pelaporan keuangan pada organisasi nonlaba dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Salah satu faktor utama adalah pemahaman sumber daya manusia yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan. Bendahara atau pengelola keuangan yang memiliki pemahaman mengenai ISAK 35 akan lebih mampu melakukan pengelompokan transaksi, menyusun laporan sesuai standar, serta memberikan informasi keuangan yang lebih akurat. Sebaliknya, keterbatasan pemahaman akuntansi dapat menyebabkan organisasi

hanya melakukan pencatatan sederhana berupa penerimaan dan pengeluaran kas tanpa menyusun laporan keuangan secara lengkap.

Selain pemahaman pengelola keuangan, kepatuhan juga dipengaruhi oleh dukungan dari struktur organisasi. Dalam organisasi gereja, khususnya GKJW jemaat Banjarejo, pendeta dan majelis jemaat memiliki peran penting dalam menciptakan budaya akuntabilitas dan mendorong penerapan sistem pelaporan keuangan sesuai standar. Dukungan organisasi dapat berupa pemberian arahan, penyediaan pelatihan, pengawasan terhadap proses keuangan, serta komitmen untuk meningkatkan transparansi pengelolaan dana gereja.

Permasalahan rendahnya kepatuhan pelaporan keuangan pada gereja masih sering ditemukan. Sebagian gereja masih berfokus pada pencatatan transaksi kas masuk dan kas keluar, tetapi belum menyusun laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan sesuai ISAK 35 (Palupi et al., 2023). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan aturan, tetapi juga oleh kesiapan organisasi dalam menerapkan aturan tersebut. Oleh karena itu, analisis faktor yang memengaruhi kepatuhan menjadi penting untuk mengetahui hambatan dan upaya perbaikan dalam penerapan ISAK 35.

Entitas Nonlaba

Entitas nonlaba adalah entitas yang melakukan pelayanan masyarakat dan tidak mempunyai tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba (Purba & Ndruru, 2023). Berbeda dengan entitas bisnis yang berorientasi pada laba dan mempertanggungjawabkan kinerjanya pada investor, entitas nonlaba lebih menekankan pada pertanggungjawaban kepada jemaat, donatur, dan pihak yang memberikan sumber daya.

Sumber daya entitas nonlaba umumnya berasal dari kontribusi sukarela, seperti persembahan, sumbangan, bantuan, maupun dukungan lainnya dari individu atau lembaga tertentu (Fitri et al., 2025). Karena sumber daya tersebut berasal dari pihak yang mempercayakan dana untuk tujuan pelayanan, maka entitas nonlaba memiliki kewajiban untuk menunjukkan bahwa pengelolaan dana dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab. Hal ini menjadikan laporan keuangan sebagai instrumen penting dalam membangun kepercayaan antara organisasi dengan pemberi sumber daya.

Dalam konteks gereja, karakteristik sebagai entitas nonlaba terlihat dari tujuan utama organisasi yang berfokus pada pelayanan keagamaan, pembinaan iman, dan kegiatan sosial. Walaupun gereja dapat mengalami surplus penerimaan dibandingkan pengeluaran, surplus tersebut bukan merupakan laba yang dibagikan kepada pihak tertentu, melainkan digunakan kembali untuk mendukung keberlangsungan pelayanan organisasi. Oleh sebab itu, mekanisme pelaporan keuangan gereja perlu diarahkan pada prinsip akuntabilitas dan transparansi sesuai dengan karakteristik entitas nonlaba.

Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi mengenai kondisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas dalam periode tertentu (Kasmir, 2021). Informasi dalam laporan keuangan digunakan oleh pihak internal maupun eksternal sebagai dasar dalam melakukan evaluasi dan pengambilan keputusan. Pada organisasi nonlaba, fungsi laporan keuangan tidak hanya menggambarkan kondisi ekonomi organisasi, tetapi juga menjadi bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan sumber daya yang diperoleh dari pihak lain. Oleh karena itu, laporan keuangan entitas nonlaba menekankan pada aspek transparansi, akuntabilitas, serta pertanggungjawaban atas penggunaan sumber daya yang berasal dari donatur, anggota, maupun pihak lainnya.

Berbeda dengan entitas berorientasi laba yang menilai keberhasilan melalui kemampuan menghasilkan keuntungan, keberhasilan entitas nonlaba lebih berkaitan dengan kemampuan

organisasi menjalankan misi pelayanan secara efektif dan mempertanggungjawabkan sumber daya yang diterima. Oleh karena itu, laporan keuangan entitas nonlaba perlu menyajikan informasi yang mampu menjelaskan bagaimana dana diperoleh, digunakan, serta memberikan manfaat bagi tujuan organisasi.

Penyusunan laporan keuangan berdasarkan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan 35 menjadi salah satu bentuk upaya untuk meningkatkan kualitas informasi keuangan organisasi nonlaba. Ketika laporan keuangan disusun sesuai standar, organisasi dapat menunjukkan tingkat kepatuhan, transparansi, dan akuntabilitas yang lebih baik. Dengan demikian, penerapan ISAK 35 tidak hanya dipahami sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai bagian dari praktik tata kelola organisasi yang baik.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pelaporan keuangan sesuai ISAK 35 pada GKJW Jemaat Banjarejo. Metode kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman fenomena sosial melalui penggalian informasi, pengalaman, serta pandangan dari pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan gereja sehingga tidak menggunakan konsep populasi dan sampel seperti pada penelitian kuantitatif.

Dalam penelitian kualitatif, sumber data diperoleh melalui informan penelitian yang dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan kebutuhan penelitian. Informan dalam penelitian ini ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan kriteria yang dianggap mampu memberikan informasi yang relevan mengenai penerapan dan kepatuhan pelaporan keuangan sesuai dengan ISAK 35 pada GKJW Jemaat Banjarejo.

Kriteria pemilihan informan dalam penelitian ini yaitu pihak yang terlibat secara langsung dalam pengelolaan dan pengawasan keuangan gereja. Informan utama dalam penelitian ini adalah bendahara jemaat karena memiliki tanggung jawab dalam melakukan pencatatan transaksi, penyusunan laporan keuangan, serta pengelolaan administrasi keuangan gereja. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan pendeta dan majelis jemaat sebagai informan pendukung untuk memperoleh informasi mengenai peran struktur organisasi gereja dalam mendukung penerapan transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan. Pemilihan beberapa informan tersebut bertujuan memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai faktor yang memengaruhi kepatuhan penerapan ISAK 35.

Keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh memiliki tingkat kredibilitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengujian keabsahan data dilakukan melalui teknik triangulasi, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Penggunaan triangulasi dilakukan karena penelitian kualitatif bergantung pada interpretasi data yang diperoleh dari berbagai sumber, sehingga diperlukan proses pengecekan untuk memastikan kesesuaian informasi yang ditemukan selama penelitian.

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan dan menguji kebenaran informasi yang diperoleh dari beberapa informan yang memiliki peran berbeda dalam organisasi gereja. Data hasil wawancara dengan bendahara jemaat mengenai proses pencatatan dan penyusunan laporan keuangan dibandingkan dengan informasi yang diberikan oleh pendeta dan majelis jemaat mengenai dukungan organisasi, pengawasan, serta kebijakan dalam pengelolaan keuangan. Apabila informasi dari berbagai informan menunjukkan kesesuaian, maka data tersebut dianggap memiliki tingkat kredibilitas yang lebih kuat. Sebaliknya, apabila terdapat perbedaan informasi, peneliti melakukan pendalaman kembali melalui wawancara tambahan untuk mengetahui alasan terjadinya perbedaan tersebut.

Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh melalui beberapa metode pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data hasil wawancara

mengenai penerapan ISAK 35 dibandingkan dengan hasil observasi terhadap proses pengelolaan keuangan gereja serta dokumen pendukung seperti laporan keuangan, catatan transaksi, dan dokumen administrasi keuangan lainnya. Melalui triangulasi teknik, peneliti dapat memastikan bahwa informasi yang diperoleh tidak hanya berdasarkan pernyataan informan, tetapi juga didukung oleh kondisi nyata dan bukti dokumentasi yang tersedia.

Dengan penerapan triangulasi sumber dan triangulasi teknik, penelitian ini berupaya menghasilkan data yang valid mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pelaporan keuangan sesuai ISAK 35 pada GKJW Jemaat Banjarejo. Proses validasi tersebut membantu peneliti memperoleh gambaran yang lebih objektif mengenai kondisi penerapan standar akuntansi pada organisasi gereja.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman Bendahara terhadap ISAK 35

Salah satu faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan pelaporan keuangan adalah pemahaman bendahara jemaat terhadap ISAK 35. Bendahara merupakan pihak yang memiliki peran utama karena menjadi pihak yang berhubungan langsung dengan proses pencatatan transaksi, pengelolaan dokumen keuangan, hingga penyusunan laporan keuangan gereja. Tingkat pemahaman bendahara terhadap standar akuntansi akan menentukan kemampuan dalam menerjemahkan ketentuan ISAK 35 ke dalam praktik pelaporan. Pemahaman yang baik memungkinkan bendahara menyusun laporan keuangan yang lebih sesuai standar dan ketentuan yang berlaku, sedangkan keterbatasan pemahaman dapat menyebabkan penyajian laporan masih terbatas pada pencatatan kas masuk dan kas keluar tanpa mengikuti struktur laporan keuangan yang ditetapkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bendahara GKJW Jemaat Banjarejo telah memiliki pemahaman dasar mengenai aktivitas keuangan gereja, terutama terkait pencatatan penerimaan dan pengeluaran dana. Namun, pemahaman tersebut masih bersifat praktis berdasarkan pengalaman menjalankan tugas, bukan berdasarkan pemahaman terhadap konsep dan ketentuan dalam ISAK 35. Hal tersebut terlihat dari pernyataan informan bendahara yang menjelaskan bahwa:

“Selama ini pencatatan keuangan gereja dilakukan berdasarkan kebiasaan yang sudah berjalan. Kami mencatat uang masuk dan uang keluar setiap kegiatan, tetapi untuk penyusunan laporan seperti yang diatur dalam ISAK 35 belum memahami bentuk dan caranya.” (Ibu Dwi Kristiani selaku Bendahara GKJW Jemaat Banjarejo).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa bendahara telah menjalankan fungsi administrasi keuangan, tetapi belum sepenuhnya memahami bahwa laporan keuangan entitas nonlaba memiliki karakteristik yang berbeda dengan pencatatan kas sederhana. Dalam ISAK 35, laporan keuangan tidak hanya bertujuan menunjukkan jumlah penerimaan dan pengeluaran, tetapi juga memberikan informasi mengenai posisi keuangan, perubahan aset neto, aktivitas organisasi, serta pertanggungjawaban penggunaan sumber daya. Dengan demikian, keterbatasan pemahaman mengenai struktur laporan keuangan dapat menyebabkan organisasi belum mampu memenuhi seluruh aspek kepatuhan pelaporan sesuai standar.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa permasalahan penerapan ISAK 35 bukan hanya terletak pada kesiapan organisasi untuk mengikuti standar, tetapi juga pada kemampuan individu yang bertanggung jawab dalam proses penyusunannya. Secara konseptual, kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh kompetensi sumber daya manusia yang mengelola informasi keuangan. Yuliani & Agustini, (2018) menjelaskan bahwa kompetensi dan pemahaman penyusun laporan keuangan berperan dalam menghasilkan informasi keuangan yang berkualitas. Namun, dalam konteks organisasi gereja, kompetensi tersebut tidak selalu diperoleh melalui pendidikan akuntansi formal, melainkan sering berasal dari pengalaman pelayanan dan kebiasaan administrasi yang telah dilakukan.

Kondisi tersebut juga terlihat dari hasil observasi yang menunjukkan bahwa sistem pencatatan keuangan gereja masih berorientasi pada kebutuhan operasional sehari-hari. Dokumen keuangan yang tersedia lebih banyak menggambarkan transaksi kas masuk dan kas keluar, sementara penyajian informasi mengenai aset, liabilitas, aset neto, serta catatan atas laporan keuangan belum dilakukan secara lengkap. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik pelaporan yang dilakukan gereja dengan tujuan ISAK 35 yang menghendaki penyajian laporan keuangan secara lebih sistematis dan informatif.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Warastuti et al., (2022) yang menunjukkan bahwa keterbatasan pemahaman pengelola keuangan menjadi salah satu hambatan dalam penerapan ISAK 35 pada organisasi gereja. Namun, penelitian ini memperlihatkan bahwa keterbatasan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kurangnya pengetahuan teknis akuntansi, tetapi juga berkaitan dengan belum adanya proses pembelajaran dan pendampingan yang membantu bendahara memahami perubahan paradigma pelaporan keuangan dari sekadar pencatatan transaksi menuju penyajian informasi keuangan yang akuntabel.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pengurus gereja, diketahui bahwa dukungan untuk meningkatkan pemahaman terhadap standar akuntansi masih diperlukan. Bapak Rapi Doa Ananda selaku Majelis Jemaat menyampaikan:

“Kalau ada pelatihan mengenai cara membuat laporan sesuai standar, tentu akan menerima dengan senang, karena selama ini bendahara mengikuti pencatatan hanya pada penerimaan dan belanja saja.”

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa faktor pemahaman bendahara memiliki keterkaitan dengan faktor organisasi, khususnya dukungan dalam bentuk pelatihan dan pendampingan. Artinya, rendahnya penerapan ISAK 35 tidak semata-mata disebabkan oleh kemampuan individu bendahara, tetapi juga dipengaruhi oleh sejauh mana organisasi menyediakan lingkungan yang mendukung penerapan standar tersebut.

Berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa pemahaman bendahara merupakan faktor penting yang memengaruhi kepatuhan pelaporan keuangan sesuai ISAK 35 pada GKJW Jemaat Banjarejo. Bendahara telah menjalankan tugas pengelolaan keuangan sesuai kebutuhan pelayanan gereja, tetapi masih membutuhkan peningkatan pemahaman teknis mengenai penyajian laporan keuangan entitas nonlaba. Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan dapat dilakukan melalui pelatihan, sosialisasi, dan pendampingan ISAK 35 sehingga bendahara tidak hanya mampu melakukan pencatatan transaksi, tetapi juga mampu menyusun laporan keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai standar yang berlaku.

Dukungan Pendeta dan Majelis Jemaat terhadap Kepatuhan Pelaporan Keuangan

Selain faktor individu, dukungan organisasi juga menjadi faktor penting yang memengaruhi penerapan standar akuntansi dalam organisasi nonlaba. Dalam konteks gereja, penerapan ISAK 35 tidak hanya bergantung pada kemampuan bendahara sebagai penyusun laporan keuangan, tetapi juga dipengaruhi oleh sejauh mana struktur organisasi gereja memberikan dukungan terhadap proses tersebut. Pendeta dan majelis jemaat memiliki peran strategis dalam membangun budaya akuntabilitas dan memberikan dukungan terhadap kepatuhan pelaporan keuangan yang transparan.

Secara konseptual dukungan tersebut dapat berupa pemberian perhatian terhadap proses pelaporan keuangan, penyediaan fasilitas yang diperlukan, serta dorongan untuk meningkatkan kemampuan pengelola keuangan. Apabila pimpinan gereja memiliki komitmen terhadap transparansi keuangan, maka proses adopsi terhadap standar akuntansi akan lebih mudah dilakukan. Sebaliknya, apabila penerapan standar hanya dibebankan kepada bendahara tanpa dukungan dari pihak lain, maka kepatuhan pelaporan keuangan cenderung sulit tercapai.

Kepemimpinan dalam organisasi gereja memiliki pengaruh terhadap keberhasilan penerapan suatu sistem karena pemimpin berperan dalam menentukan arah kebijakan organisasi. Pendeta dan majelis jemaat sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab dalam pengambilan keputusan dapat menciptakan lingkungan organisasi yang mendukung transparansi dan akuntabilitas. Dukungan dari pimpinan gereja tersebut dapat meningkatkan motivasi bendahara dalam memperbaiki kualitas laporan keuangan serta mendorong adanya evaluasi terhadap sistem pencatatan yang telah berjalan agar sesuai dengan standar yang berlaku. Oleh karena itu, semakin besar dukungan pendeta dan majelis jemaat, maka semakin besar kemungkinan organisasi mampu meningkatkan kepatuhan terhadap ISAK 35.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendeta dan majelis jemaat GKJW Jemaat Banjarejo telah memberikan dukungan dalam proses pengelolaan keuangan gereja. Dukungan pendeta terlihat melalui pengawasan terhadap pengelolaan dana, pemberian arahan, serta keterlibatan dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pencatatan transaksi keuangan. Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan Ibu Christalina Devita Sari, S.Si., CCM. selaku pendeta menyampaikan:

“Dukungan yang dapat saya berikan berupa masukan atau arahan dalam pencatatan apabila bendahara terdapat keraguan dalam memasukkan dalam pos tertentu dan juga pengawasan dalam pengelolaan keuangan gereja.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pendeta memiliki perhatian terhadap aspek akuntabilitas keuangan gereja. Namun, dukungan yang diberikan masih berada pada aspek pengawasan moral dan administratif, belum sampai pada pendampingan teknis terkait penerapan ISAK 35. Hal ini terlihat dari keterbatasan pemahaman pendeta terhadap struktur laporan keuangan entitas nonlaba. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan dukungan dari pimpinan organisasi belum secara otomatis menjamin kepatuhan terhadap standar akuntansi apabila pihak yang memberikan dukungan belum memiliki pemahaman teknis mengenai standar yang diterapkan.

Dalam perspektif tata kelola organisasi, dukungan pimpinan memiliki fungsi penting sebagai pengarah dan pengendali suatu proses perubahan. Namun, dalam penerapan ISAK 35, dukungan tersebut perlu dilengkapi dengan pemahaman mengenai substansi standar agar pengawasan yang dilakukan tidak hanya memastikan laporan keuangan tersedia, tetapi juga memastikan bahwa laporan tersebut telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, keterbatasan pemahaman pimpinan gereja dapat menjadi faktor yang membatasi efektivitas dukungan organisasi terhadap peningkatan kualitas pelaporan keuangan.

Selain pendeta, majelis jemaat juga memberikan dukungan terhadap bendahara dalam menjalankan tugas pengelolaan keuangan. Bentuk dukungan tersebut terlihat melalui pemberian masukan, membantu proses administrasi, serta memberikan fasilitas sederhana untuk mendukung pencatatan keuangan. Bapak Rapi Doa Ananda selaku majelis jemaat menjelaskan:

“Dengan memberikan CK (cinta kasih) berupa materi yang diberikan kepada bendahara per bulan. Apabila dalam pencatatan dan pelaporan bendahara jemaat mengalami kendala, maka majelis jemaat dapat memberikan bantuan dan masukan yang sesuai.”

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa majelis jemaat telah berperan dalam mendukung efektivitas pengelolaan keuangan melalui bantuan administratif dan fasilitas pencatatan. Namun, dukungan tersebut masih berfokus pada kelancaran proses administrasi, bukan pada peningkatan kualitas laporan keuangan berdasarkan ISAK 35. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan organisasi di GKJW Jemaat Banjarejo telah tersedia, tetapi belum sepenuhnya diarahkan untuk membangun sistem pelaporan keuangan berbasis standar akuntansi entitas nonlaba.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Apriliana et al. (2024) yang menjelaskan bahwa dukungan dan pengawasan dari pihak internal organisasi berperan dalam meningkatkan

kepatuhan terhadap standar pelaporan keuangan. Namun, hasil penelitian ini memberikan gambaran yang lebih spesifik bahwa dukungan organisasi dalam konteks gereja memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan organisasi formal lainnya. Dukungan yang diberikan lebih banyak berbentuk pelayanan, kepercayaan, dan pendampingan informal, sedangkan penerapan standar akuntansi membutuhkan dukungan yang lebih terstruktur seperti pelatihan, penyusunan prosedur pelaporan, serta evaluasi berkala terhadap laporan keuangan.

Perbedaan antara dukungan yang telah diberikan dengan kebutuhan penerapan ISAK 35 menunjukkan bahwa hambatan penerapan standar bukan hanya berasal dari kurangnya kemauan organisasi, tetapi juga karena adanya keterbatasan pengetahuan mengenai bagaimana standar tersebut diterapkan. Artinya, organisasi gereja telah memiliki kesadaran mengenai pentingnya transparansi keuangan, tetapi masih membutuhkan peningkatan kapasitas agar transparansi tersebut diwujudkan melalui mekanisme pelaporan yang sesuai standar.

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa dukungan pendeta dan majelis jemaat merupakan faktor yang memengaruhi kepatuhan pelaporan keuangan sesuai ISAK 35 pada GKJW Jemaat Banjarejo. Dukungan tersebut telah diberikan melalui pengawasan, arahan, konsultasi, apresiasi, dan bantuan administratif kepada bendahara. Namun, dukungan tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih terbatas pada aspek pengelolaan umum dan belum mencakup pemahaman teknis mengenai ISAK 35. Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan pelaporan keuangan membutuhkan keterlibatan seluruh struktur gereja, tidak hanya bendahara, tetapi juga pendeta dan majelis jemaat melalui peningkatan pemahaman dan pendampingan mengenai standar akuntansi entitas nonlaba.

Kendala atau Hambatan terhadap Kepatuhan ISAK 35

Faktor lain yang memengaruhi kepatuhan pelaporan keuangan sesuai ISAK 35 adalah kendala yang dihadapi dalam proses penerapan standar. Kendala tersebut dapat berasal dari aspek teknis maupun nonteknis. Kendala teknis dapat berupa keterbatasan sistem pencatatan, kurangnya pemahaman mengenai format laporan keuangan, serta kesulitan dalam melakukan pengelompokan akun sesuai standar. Sementara itu, kendala non teknis dapat berupa keterbatasan sumber daya manusia, minimnya pelatihan, serta kurangnya perhatian pemimpin organisasi terhadap pentingnya penerapan standar akuntansi. Dalam konteks organisasi gereja, hambatan penerapan standar tidak hanya menunjukkan keterbatasan dalam penyusunan laporan, tetapi juga menggambarkan tingkat kesiapan organisasi dalam mengadopsi praktik tata kelola keuangan yang lebih akuntabel. Berbagai kendala tersebut dapat menghambat proses penyusunan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan ISAK 35.

Berdasarkan hasil wawancara, bendahara menyampaikan bahwa selama ini tidak terdapat kendala dalam proses penyusunan laporan keuangan gereja. Bendahara mampu menyusun laporan secara rutin dan menyampaikan laporan tersebut kepada jemaat sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana. Hal ini menunjukkan bahwa proses administrasi keuangan gereja telah berjalan dengan baik sesuai dengan kebutuhan gereja. Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Dwi Kristiani selaku Bendahara:

“Kalau untuk laporan keuangan selama ini tidak ada kesulitan, karena setiap pemasukan dan pengeluaran tetap dicatat dan nanti dibuat laporan kepada jemaat.”

Namun, hasil analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa terdapat hambatan yang tidak disadari, yaitu keterbatasan pengetahuan mengenai standar pelaporan keuangan yang berlaku bagi organisasi nonlaba. Hambatan utama dalam penerapan ISAK 35 bukan terletak pada kemampuan bendahara dalam melakukan pencatatan transaksi sehari-hari, melainkan pada kurangnya pemahaman terhadap standar penyajian laporan keuangan. Bendahara masih menyusun laporan berdasarkan kebiasaan yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu laporan realisasi pendapatan dan laporan realisasi belanja. Laporan tersebut telah memberikan informasi mengenai penerimaan dan

penggunaan dana gereja, tetapi belum menyajikan informasi keuangan secara lengkap sebagaimana yang dipersyaratkan dalam ISAK 35.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik pelaporan keuangan yang dilakukan organisasi dengan standar akuntansi yang berlaku. Dalam teori kepatuhan, penerapan suatu aturan tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan organisasi dan individu dalam memahami serta menerapkan aturan tersebut. Artinya, meskipun ISAK 35 telah tersedia sebagai pedoman penyusunan laporan keuangan entitas nonlaba, standar tersebut tidak akan berjalan optimal apabila pihak yang bertanggung jawab belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai tujuan dan mekanisme penerapannya.

Selain keterbatasan pemahaman, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa belum terdapat pelatihan atau pendampingan khusus mengenai penerapan ISAK 35 pada tingkat jemaat. Selama ini, bendahara menjalankan tugas berdasarkan pengalaman dan kebiasaan dari periode sebelumnya. Kondisi tersebut menyebabkan proses penyusunan laporan keuangan cenderung bersifat rutin dan administratif, tetapi belum berkembang menuju sistem pelaporan yang berbasis standar akuntansi. Ibu Dwi Kristiani menjelaskan:

“Selama ini belum pernah ada pelatihan khusus mengenai ISAK 35. Kami hanya mengikuti cara penyusunan laporan yang sudah ada sebelumnya, sehingga kalau ada format baru mungkin masih perlu belajar lagi.”

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa keterbatasan penerapan standar bukan hanya disebabkan oleh faktor individu, tetapi juga berkaitan dengan dukungan organisasi dalam menyediakan peningkatan kapasitas bagi pengelola keuangan. Tanpa adanya proses sosialisasi dan pendampingan, perubahan menuju sistem pelaporan yang sesuai standar akan sulit dilakukan karena pengelola keuangan cenderung mempertahankan metode yang sudah dianggap berjalan.

Temuan penelitian ini sejalan dengan Fitri et al. (2025) yang menjelaskan bahwa peningkatan kualitas pelaporan keuangan organisasi sosial membutuhkan peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan pemahaman dasar akuntansi. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa pada organisasi gereja, kebutuhan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kemampuan teknis bendahara, tetapi juga membutuhkan dukungan dari struktur organisasi agar penerapan standar dapat menjadi bagian dari kebijakan pengelolaan keuangan gereja. Dengan demikian, peningkatan kepatuhan ISAK 35 perlu dipandang sebagai proses organisasi, bukan hanya tanggung jawab individu penyusun laporan.

Hasil penelitian ini juga memperkuat temuan Finna Julyana et al. (2024) yang menyatakan bahwa keterbatasan kemampuan sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penghambat dalam penyusunan laporan keuangan sesuai standar. Namun, pada konteks GKJW Jemaat Banjarejo, hambatan tersebut memiliki karakteristik khusus karena pengelolaan keuangan dilakukan dalam lingkungan pelayanan gereja yang mengandalkan keterlibatan sukarela. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi perlu dilakukan dengan pendekatan yang sesuai dengan kondisi organisasi, seperti pelatihan sederhana, pendampingan berkelanjutan, serta penyediaan pedoman penyusunan laporan keuangan yang mudah dipahami.

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa kendala utama penerapan ISAK 35 pada GKJW Jemaat Banjarejo bukan berasal dari ketidakmampuan dalam melakukan pencatatan keuangan, melainkan dari keterbatasan pemahaman mengenai standar penyajian laporan keuangan entitas nonlaba. Proses pelaporan keuangan telah berjalan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada jemaat, tetapi belum sepenuhnya memenuhi prinsip dan komponen yang ditetapkan dalam ISAK 35. Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan pelaporan keuangan memerlukan upaya peningkatan kompetensi bendahara, dukungan pendeta dan majelis jemaat, serta adanya pelatihan dan pendampingan agar penerapan ISAK 35 dapat dilakukan secara lebih optimal.

KESIMPULAN dan SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pelaporan keuangan sesuai ISAK 35 pada GKJW Jemaat Banjarejo, dapat disimpulkan bahwa pemahaman bendahara jemaat terhadap ISAK 35 masih belum memadai. Faktor utama yang mempengaruhi kondisi tersebut adalah keterbatasan pemahaman bendahara jemaat terhadap ISAK 35. Bendahara telah melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan melalui pencatatan penerimaan dan pengeluaran dana serta penyusunan laporan pertanggungjawaban kepada jemaat, namun belum memahami secara teknis ISAK 35 sebagai pedoman penyajian laporan keuangan entitas nonlaba. Hal ini menyebabkan laporan keuangan yang disusun masih berfokus pada laporan realisasi pendapatan dan belanja, serta belum mencakup seluruh komponen laporan keuangan yang dipersyaratkan dalam ISAK 35.

Dukungan pendeta dan majelis jemaat terhadap pengelolaan keuangan gereja telah berjalan melalui pengawasan, konsultasi, bantuan administratif, serta pemberian apresiasi kepada bendahara. Namun, dukungan tersebut belum secara khusus diarahkan pada penerapan ISAK 35 karena pendeta dan majelis jemaat juga belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai standar tersebut. Selain itu, penelitian menemukan adanya hambatan yang belum disadari oleh bendahara, yaitu keterbatasan pemahaman terhadap ISAK 35. Meskipun bendahara merasa tidak mengalami kendala dalam penyusunan laporan keuangan, hasil observasi dan dokumentasi menunjukkan bahwa kurangnya pengetahuan mengenai standar menjadi hambatan utama dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai ketentuan.

Selain itu, penelitian menemukan bahwa kendala utama dalam penerapan ISAK 35 bukan terletak pada kemampuan gereja dalam melakukan pencatatan transaksi keuangan, melainkan pada kesenjangan antara praktik pelaporan yang telah berjalan dengan ketentuan standar akuntansi entitas nonlaba. Kurangnya pelatihan, sosialisasi, dan pendampingan mengenai ISAK 35 menyebabkan pengelola keuangan masih menggunakan metode penyusunan laporan berdasarkan kebiasaan sebelumnya. Dengan demikian, kepatuhan pelaporan keuangan sesuai ISAK 35 dipengaruhi oleh keterkaitan antara faktor individu, dukungan organisasi, dan kesiapan gereja dalam menerapkan standar akuntansi.

Implikasi Praktis

Hasil penelitian ini memberikan implikasi praktis bahwa penerapan ISAK 35 membutuhkan keterlibatan seluruh unsur organisasi, bukan hanya tanggung jawab bendahara sebagai penyusun laporan keuangan. Pengurus gereja perlu meningkatkan pemahaman mengenai standar pelaporan keuangan melalui kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan agar proses penyusunan laporan keuangan dapat dilakukan sesuai dengan karakteristik entitas nonlaba.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, penelitian hanya dilakukan pada satu objek penelitian, yaitu GKJW Jemaat Banjarejo, sehingga hasil penelitian menggambarkan kondisi pada karakteristik organisasi tersebut dan belum dapat menggambarkan kondisi seluruh organisasi gereja atau entitas nonlaba lainnya. Kedua, penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jumlah informan yang terbatas sehingga temuan penelitian lebih menggambarkan pengalaman dan kondisi nyata dari pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan gereja.

Selain itu, keterbatasan penelitian juga terdapat pada fokus kajian yang lebih menekankan faktor pemahaman bendahara, dukungan organisasi, dan kendala penerapan ISAK 35. Penelitian ini belum mengkaji faktor lain seperti budaya organisasi, sistem pengendalian internal, maupun pengaruh regulasi eksternal yang mungkin turut memengaruhi tingkat kepatuhan pelaporan

keuangan entitas nonlaba. Oleh karena itu, hasil penelitian perlu dipahami sesuai dengan konteks dan ruang lingkup penelitian yang dilakukan.

Saran

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas objek penelitian dengan melibatkan lebih banyak gereja atau organisasi nonlaba agar memperoleh gambaran yang lebih luas mengenai penerapan ISAK 35. Penelitian berikutnya juga dapat menggunakan metode kuantitatif atau metode campuran untuk mengukur faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pelaporan keuangan secara lebih komprehensif. Selain itu, penelitian lanjutan dapat mengkaji efektivitas pelatihan dan sosialisasi ISAK 35 dalam meningkatkan kemampuan pengelola keuangan organisasi nonlaba.

REFERENSI

- Alvionita, N., Kamila, A., Lusianti, Alfitri, S., & Febriyanti, R. (2025). Peran Transparansi Laporan Keuangan kepada Pihak Eksternal dalam Meminimalisir Asimetri Informasi. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 2(2), 1–7. <https://doi.org/https://doi.org/10.69714/gzcehn49>
- Fitri, S. A., Ramadhani, I., Alhumairo, K., Safitri, L., & Amanda, P. (2025). Proposal For the Implementation of Isak 335 In the Presentation of Financial Reports of Children's Care Institutions (PSAA) Hamzah Ludin. *Jurnal Kewirausahaan, Akuntansi Dan Manajemen Tri Bisnis*, 7(2), 155–166. <https://doi.org/10.59806/jkamtb.v7i2.510>
- Girsang, C. M., & Purba, S. (2024). Penerapan Isak 35 Terhadap GKPS Saribudolok Tentang Laporan Keuangan Organisasi Non-Laba (Vol. 1, Issue 1). <https://ejournal.smart-scienti.com/Smart-Dedication>
- IAI. (2018). ISAK 35: Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba. In *DSAK-IAI: Jakarta*.
- Kasmir. (2021). *Analisis Laporan Keuangan*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Palupi, D. A. P., Nugroho, B., & Puspitasari, L. (2023). Sistem Pelaporan Keuangan Gereja yang Baik dan Benar berdasarkan ISAK 35 di Gereja Kristen Jawa Juwiring. *Jurnal Pengabdian Masyarakat STIE Surakarta*, 2(1), 103–110. <https://doi.org/10.56456/dimaseta.v2i1.37>
- Purba, S., & Ndruru, M. (2023). Penerapan ISAK 35 Tentang Laporan Keuangan Organisasi Non-Laba pada Gereja BNKP Hiliotalua. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan, Auditing*, 5(1), 34–42. <https://journal.maranatha.edu/index.php/jafta>
- Warastuti, Y., Susilawati, C., Butra-Butar, S., & Murniati, M. P. (2022). Studi Kualitatif Persepsi Pengurus Gereja Terhadap Pelaporan Keuangan Berbasis Isak 35. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Dan Perpajakan*, 5(1), 88–108. <http://iaiglobal.or.id/>
- Yuliani, N. L., & Agustini, R. D. (2018). Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pemanfaatan. *Jurnal Bisnis & Ekonomi*, Volume 14,(1), 56–64.